



## Satu Dasawarsa Keistimewaan Entaskan Kemiskinan, DIY Fokus Reformasi Kalurahan



KR-Franz Boediskamanto

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menggelar Sapa Aruh didampingi Sekda DIY Drs Kadarmanta Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (31/8).

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemadi di masyarakat, untuk selanjutnya dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran. Semua itu selaras dengan greget "Mangasah Mingsing Budi". Begitu pula dengan sosial-ekonomi, perlu menilik peran budaya, sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan. "Idealnya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka. Tetapi harus dimoderasi melalui

pendidikan karakter, dengan mengupdate nilai-nilai 'gemi, nastiti, ngati-ngati'. Semua itu selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praktis, yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan keistimewaan," kata Sultan dalam acara Sapa Aruh bertepatan dengan momentum peringatan satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY di Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8).

Sultan mengatakan, pentingnya reformasi kalurahan di DIY. Reformasi tersebut sangat penting agar

46 kelurahan dan 392 kalurahan di DIY menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Pasalnya jika potensi keunggulan dilancarkan dari kalurahan, maka kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. Konsep tersebut relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan, dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu berada di kalurahan. Kesemuanya itu bermuara pada reformasi kalurahan sebagai basis keistimewaan DIY. Selain itu Pemda DIY juga berkomitmen mewujudkan

\* Bersambung hal 7 kol 1

kalurahan sebagai patrap Tri Muka yang menjadikan kalurahan sebagai arena demokrasi politik dan ekonomi lokal. Hal itu merupakan wujud kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Selain itu kalurahan pun berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warganya.

“Reformasi yang dilakukan di tingkat kalurahan dapat direalisasikan melalui pengembangan beragam program yang dimiliki. Masing-masing kalurahan bisa menggunakan Danaís dalam mengembangkan kalurahan, selain dana desa. Contohnya menyewa tanah kas desa untuk pengembangan usaha dengan memakai Danaís. Misalnya pilihan di sektor pertanian, ya sudah nyewa saja tanah kas desa di wilayah itu untuk bercocok tanam. Nanti kan dapat bantuan Danaís itu buat nyewa lahan supaya APBDdesa juga bertambah,” terangnya.

Sultan menjelaskan, saat ini sudah ada 10 kalurahan yang menjadi percontohan. Sultan berharap kalurahan lain dapat meniru 10 kalurahan percontohan dalam pemanfaatan Danaís untuk pemberdayaan masyarakat. Kalurahan tersebut seperti yang ada di Breksi, Mangunan, Nglanggèran, dan juga Gedangsari.

Gubernur DIY menambahkan, dalam konteks keamanan, meski beberapa waktu terakhir terjadi kasus kekerasan, keamanan Yogyakarta dianggap relatif baik. Kasus kekerasan bisa saja terjadi di manapun. Namun Sultan meminta masyarakat untuk lebih beradab dan menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Rasa empati pun harus dikedepankan dan menjadi sesuatu yang penting diterapkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji mengungkapkan, pada prinsipnya Gubernur bisa

mendorong kalurahan dari dua hal. Pertama dari bantuan Gubernur kedua lewat BKK Danaís. Artinya ke depan seluruh kalurahan di DIY akan mendapatkan BKK.

“Beliau tadi kan ngendika bahwa dana yang kita salurkan ke kalurahan itu harus untuk investasi bukan hanya konsumsi. Sehingga kalau memang ada semacam proposal atau rencana satu kalurahan tertentu kita lihat potensi dan rencananya seperti apa,” jelas Baskara Aji.

Menurut Baskara Aji, Gubernur DIY sempat menanyakan kenapa tanah-tanah kas desa banyak yang disewakan untuk investor. Padahal terkadang hal itu tidak memberikan efek ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian di kalurahan. Untuk itu, Ngarsa Dalem berharap agar tanah-tanah tersebut bisa dipergunakan sendiri oleh masyarakat untuk pengembangan ekonomi. **(Ria/Ira)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005